



MASALAH PENGUNGSI ROHINGYA, INDONESIA, DAN ASEAN

Simela Victor Muhamad*)

Abstrak

Isu pengungsi Rohingya kembali menarik perhatian masyarakat internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan ribuan pengungsi etnis minoritas dari Myanmar tersebut telah meninggalkan Myanmar menuju negara-negara tetangga melalui laut. Gelombang pengungsi tersebut telah menimbulkan persoalan bagi negara-negara di kawasan dan sekaligus keprihatinan bagi masyarakat internasional karena telah terjadi krisis kemanusiaan di sini. Penyebab terjadinya pengungsian, dan bagaimana Indonesia serta ASEAN sebagai organisasi di kawasan menyikapi persoalan ini akan menjadi fokus analisis tulisan singkat ini.

Pendahuluan

Dalam beberapa minggu terakhir gelombang pengungsi etnis minoritas Rohingya dari Myanmar, dan juga migran dari Bangladesh, menjadi pemberitaan media massa nasional dan internasional. Para pengungsi dan migran tersebut “mendatangi” Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Di Indonesia sendiri, para pengungsi dan imigran itu memakai perahu dan terdampar di Aceh dan Sumatera Utara dalam empat gelombang. PBB memperkirakan setiap tahun ribuan pengungsi Rohingya asal Myanmar dan migran asal Bangladesh berlayar menuju Malaysia dan Indonesia dengan kapal-kapal dari sindikat perdagangan manusia.

Dalam tiga bulan pertama 2015, PBB memperkirakan ada 25.000 pengungsi yang berangkat, kebanyakan dari kamp-kamp gelap di Thailand. Menarik untuk dikaji, mengapa

aliran pengungsi etnis minoritas Rohingya dari Myanmar terus mengalir “mendatangi” negara-negara Asia Tenggara lain, khususnya Indonesia dan Malaysia. Kajian singkat ini mengungkap penyebab etnis Rohingya mengungsi, dan bagaimana Indonesia serta ASEAN menyikapi hal tersebut.

Penyebab Etnis Rohingya Mengungsi

Pemberitaan media dan referensi yang mengungkap perihal pengungsi Rohingya, menunjukkan bahwa kebijakan keras dan diskriminatif pemerintah Myanmar atas etnis Rohingya ditengarai sebagai penyebab utama terjadinya pengungsian tersebut. Sejak pemerintahan sipil Myanmar hasil pemilihan umum terbentuk tahun 2010, isu diskriminasi dan intimidasi terhadap warga Rohingya terus mencuat dan mencuri perhatian dunia.

*) Peneliti Madya Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI, email: victorsimela@yahoo.co.id.



Diskriminasi yang diterapkan Pemerintah Myanmar terhadap warga Rohingya dinilai masyarakat internasional jauh lebih buruk daripada segregasi rasial ala Apartheid di Afrika Selatan. Kebijakan diskriminatif, termasuk tidak diakuiinya warga Rohingya sebagai warga negara dalam konstitusi Myanmar, disebut sebagai akar persoalan krisis kemanusiaan ini. Penilaian tersebut juga ditegaskan Deputy Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony J. Blinken saat bertemu Presiden Thein Sein di Naypyidaw, Myanmar, 21 Mei 2015.

Selama ini Pemerintah Myanmar menganggap etnis Rohingya sebagai warga ilegal asal Bangladesh. Di Myanmar, kelompok minoritas itu kerap diperlakukan diskriminatif dan mengalami kekerasan. Di antara etnis-etnis yang ada di Myanmar, Rohingya adalah salah satu kelompok etnis minoritas, dan etnis ini bukan asli Myanmar; penampilan fisik mereka lebih mirip masyarakat Asia Selatan dibanding orang-orang Asia Tenggara. Etnis ini belum diakui oleh Pemerintah Myanmar sehingga dianggap ilegal keberadaannya dan mendapat perlakuan diskriminatif yang berlebihan dari pemerintah dan penduduk setempat. Orang-orang Rohingya tidak mendapatkan hak kewarganegaraan dan dianggap sebagai imigran gelap.

Temuan yang cukup mengejutkan diungkapkan oleh Matthew Smith, direktur eksekutif organisasi hak asasi manusia *Fortify Rights* berdasarkan dokumen resmi yang secara langsung memperlihatkan keterlibatan pemerintah Myanmar dalam kebijakan keras dan diskriminatif atas Muslim Rohingya. Dokumen rahasia yang dipublikasikan setebal 79 halaman itu mengungkapkan, para pejabat Myanmar telah mengeluarkan perintah kepada otoritas negara bagian Rakhine sejak 1993 hingga 2008 agar secara konsisten menjalankan kebijakan negara yang membatasi Rohingya. Kelompok HAM yang memperoleh bocoran ini mengatakan sebagian besar kebijakan tersebut hingga kini masih berlaku.

Pada tahun 2014 Pemerintah Myanmar melarang penggunaan istilah Rohingya dan mendaftarkan orang-orang Rohingya sebagai orang Bengali dalam sensus penduduk saat itu. Pada bulan Maret 2015 Pemerintah Myanmar mencabut kartu identitas penduduk bagi orang-orang Rohingya yang menyebabkan mereka kehilangan kewarganegaraannya

dan tidak mendapatkan hak-hak politiknya. Situasi yang tidak kondusif, ditambah dengan sejarah konflik dan kerusuhan rasial yang pernah terjadi sebelumnya yang melibatkan suku Rakhine dan Rohingya, semakin menambah kekhawatiran orang-orang Rohingya akan keamanan mereka jika tetap bermukim di Myanmar. Ini menyebabkan mereka mengungsi ke Thailand, Malaysia dan Indonesia.

Sikap Indonesia

Sebetulnya eksodus etnis Rohingya dari Myanmar dengan menggunakan perahu bukan fenomena baru. Gelombang pengungsian besar-besaran pertama etnis Rohingya dengan menumpang perahu terjadi tahun 2012 saat konflik sektarian antara warga minoritas Muslim Rohingya dengan mayoritas Budhis di negara bagian Rakhine di Myanmar makin memburuk. Ketika itu lebih 200 warga etnis Rohingya tewas dan 140.000 lainnya digiring ke kamp-kamp penampungan.

Dalam kasus pengungsi yang terjadi bulan Mei 2015 ini, hampir 800 migran Rohingya dan Bangladesh diselamatkan nelayan Aceh dengan menarik perahu mereka ke pantai. Nelayan Aceh menarik dua perahu ke pesisir kota Langsa pada 15 Mei 2015. Satu perahu lain ditemukan sehari sebelumnya. Menurut keterangan PBB masih ada ribuan migran lain yang terkatung-katung di tengah laut, dan diperkirakan 3.000 orang telah diselamatkan setelah terdampar di pantai-pantai Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Para migran dari Bangladesh ingin mencari kehidupan lebih baik, dan mereka tidak dapat dikategorikan sebagai pengungsi. Dari proses registrasi yang dilakukan oleh Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR), para migran asal Bangladesh dipastikan bukan pencari suaka. Mereka keluar dari Bangladesh untuk mencari pekerjaan. Mereka dinilai tidak membutuhkan pertolongan internasional. Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia MD Nazmul Quaunine memastikan akan segera memulangkan para migran asal Bangladesh tersebut. Sebaliknya, UNHCR menetapkan pengungsi Rohingya adalah pencari suaka sehingga pantas mendapat pertolongan internasional.

Saat ini UNHCR bersama Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) berupaya mencari tempat penampungan, termasuk

kemungkinan tetap di Indonesia. Hingga 19 Mei 2015, UNHCR telah meregistrasi 332 migran asal Myanmar dan 252 migran asal Bangladesh. Registrasi itu bertujuan memastikan identitas, asal negara, dan alasan mereka pergi dari negara asal. Perwakilan UNHCR, Thomas Vargas, yang telah melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, masyarakat internasional akan membantu pendanaan bagi penampungan pengungsi Rohingya.

Sebelum akhirnya Jusuf Kalla memerintahkan menerima pengungsi, pihak keamanan laut Indonesia mendorong kapal-kapal pengungsi yang tidak terdampar di daratan Indonesia kembali ke tengah laut setelah dibantu perbekalan minum dan makanan. Menurut Kalla, Indonesia menerima pengungsi tersebut demi kemanusiaan. Indonesia akan berusaha mempersatukan keluarga yang terpisah. Adapun anak-anak yang tidak memiliki keluarga lagi akan ditampung di panti asuhan dan pesantren di Indonesia. Namun, pemerintah memberlakukan syarat, Indonesia hanya menampung pengungsi selama satu tahun. Setelah itu, harus ada repatriasi ke negara asal atau diterima di negara-negara lain yang menjadi tujuan.

Bagi Indonesia, menolong pengungsi di perairan internasional menimbulkan dilema karena Indonesia bukan tujuan utama para pengungsi, hanya menjadi lintasan. Sebelum banjir pengungsi Rohingya sebulan terakhir, gelombang pendatang tidak berdokumen dari berbagai negara Asia menggunakan Indonesia untuk melintas menuju Australia. Pusat detensi Kementerian Hukum dan HAM kewalahan menampung mereka. Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah mempertimbangkan mencari pulau untuk menampung pengungsi Rohingya.

Sikap ASEAN

Setelah sempat dikritik dan disebut mempermainkan nasib pengungsi, Malaysia sebagai Ketua ASEAN 2015 menggelar pertemuan darurat bersama Thailand dan Indonesia, yang sama-sama didatangi pengungsi. Pertemuan dilaksanakan 20 Mei 2015 di Putra Jaya. Pemerintah Myanmar menolak ikut karena khawatir pembahasan terpaku pada keberadaan warga Rohingya yang tidak diakui sebagai warga negara Myanmar.

Kritik tajam sempat muncul karena otoritas keamanan dan angkatan laut ketiga negara dianggap melakukan *blunder*. Mereka hanya memberikan bantuan, tetapi mencegah kapal sarat pengungsi itu masuk wilayah masing-masing. Langkah itu dinilai tidak berperikemanusiaan walaupun ketiga negara itu tidak menandatangani konvensi UNHCR 1951. Penanda tangan konvensi tersebut berkewajiban untuk menolong pengungsi.

Usai pertemuan di Putra Jaya, Indonesia dan Malaysia menyatakan bersedia menampung sedikitnya 7.000 pengungsi. Mereka akan ditampung selama setidaknya-tidaknya satu tahun sambil menunggu UNHCR mencarikan negara ketiga atau mengembalikan mereka ke negara asal. Namun demikian, Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman menegaskan bahwa masalah pengungsi Rohingya bukan hanya masalah ASEAN, tetapi sudah menjadi masalah komunitas internasional karena menyangkut krisis kemanusiaan.

Sorotan dunia terhadap ASEAN dalam krisis ini menempatkan ASEAN dalam pertarungan besar menyangkut kredibilitas organisasi kawasan yang berdiri di era perang dingin tersebut. Banyak pengamat menilai salah satu prinsip ASEAN turut berkontribusi dan menciptakan kerumitan tersendiri. Sejak pembentukannya, negara anggota ASEAN menyepakati prinsip non-intervensi, untuk tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing anggota. Prinsip ini membuat pendekatan yang dilakukan ASEAN untuk mengatasi masalah ini harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Apalagi, isu Rohingya dan tekanan asing bisa memanaskan suasana politik dalam negeri mengingat negara itu akan melaksanakan pemilihan umum yang akan berlangsung akhir tahun ini.

Terkait prinsip nonintervensi, ketua organisasi antar-parlemen ASEAN untuk hak asasi manusia, Charles Santiago, mengkritik Myanmar yang jauh lebih responsif dan bersedia menerima kritik tajam dari negara-negara besar, seperti Tiongkok atau AS, daripada sesama negara anggota ASEAN. Adapun peneliti isu-isu ASEAN asal Institut Kebijakan Keamanan dan Pembangunan Swedia, Elliot Brennan, menilai, krisis pengungsi manusia perahu ini bukan tidak mungkin akan memaksa negara-negara ASEAN meninjau kembali prinsip non-intervensi itu.

Mereka yang mengkritik ASEAN soal isu Rohingya kerap kali melupakan jati diri organisasi tersebut. ASEAN bukanlah organisasi supranasional yang bisa mendikte dan memaksakan negara-negara anggotanya mengambil kebijakan tertentu. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, salah satu prinsip utama ASEAN adalah prinsip non-intervensi yang melarang campur tangan atas urusan dalam negeri negara anggota. Meski dikritik oleh sebagian pihak, prinsip ASEAN ini berperan dalam menjaga keutuhan dan perdamaian di kawasan. Jika negara anggota bebas saling menghujat kebijakan dalam negeri anggota yang lain, nuansa di ASEAN akan lebih konfrontatif dan peluang konflik akan semakin terbuka.

Walaupun demikian, hal ini tidak berarti bahwa, dalam menyikapi krisis Rohingya, ASEAN hanya bisa berdiam diri. ASEAN tidak lagi dapat berkilah bahwa apa yang menimpa warga Rohingya adalah semata-mata masalah internal Myanmar, mengingat ribuan warga Rohingya sudah mengungsi ke negara ASEAN lainnya. Jika dibiarkan terus-menerus, hal ini tentu akan menjadi ancaman bagi stabilitas dan keamanan kawasan.

ASEAN terus bergerak menuju satu ikatan “masyarakat”. Layaknya satu tubuh Masyarakat ASEAN, gejala di satu tempat akan ikut dirasakan oleh negara anggota yang lain. Kondisi ini mungkin belum pernah dibayangkan oleh para pendiri ASEAN. Dalam konteks inilah, ASEAN tertantang untuk berani melihat kembali pemahaman prinsip non-intervensi. Isu bencana kemanusiaan yang melewati batas wilayah negara harus dapat segera ditangani tanpa perlu mencederai kedaulatan negara anggotanya.

Penutup

Dalam jangka pendek, ASEAN perlu memprioritaskan upaya penyelamatan nyawa para migran yang masih terkatung-katung di laut. ASEAN dapat mempertimbangkan untuk menggelar operasi bersama *search and rescue* (SAR) untuk menggiring para migran ke daratan. Selain Indonesia dan Malaysia, negara-negara ASEAN lainnya dapat menawarkan diri untuk menerima para migran. Paling tidak, negara anggota lain dapat memberikan bantuan kemanusiaan seperti makanan dan obat-obatan, di antaranya melalui ASEAN *Coordinating Center for Humanitarian Assistance* (AHA

Center). Di samping itu, ASEAN perlu terus gencar memerangi perdagangan manusia, mengingat kebanyakan dari para migran Rohingya yang terjebak di lautan tersebut diiming-imingi oleh oknum tidak bertanggung jawab yang menjanjikan penghidupan layak di negara lain.

Dalam jangka panjang, ASEAN perlu menuntaskan akar permasalahan krisis Rohingya ini. ASEAN perlu terus melakukan pendekatan konstruktif terhadap Myanmar untuk menghentikan diskriminasi terhadap kaum Rohingya yang menjadi faktor pendorong krisis saat ini. ASEAN perlu meyakinkan Myanmar bahwa menerima Rohingya dengan tangan terbuka justru akan mendatangkan banyak manfaat bagi negara tersebut.

Kerja keras Myanmar untuk melakukan reformasi kini terancam, dan isu Rohingya menjadi batu sandungan terbesar bagi kepercayaan masyarakat internasional terhadap komitmen Myanmar untuk berubah. Merangkul Rohingya akan memuluskan jalan bagi Myanmar untuk benar-benar diterima sebagai anggota oleh masyarakat internasional dan membuka pintu bagi kerja sama yang lebih erat.

Referensi

- “Myanmar Dinilai Tak Peduli”, *Kompas*, 18 Mei 2015.
- “RI, M’sia offer temporary shelter for migrants”, *The Jakarta Post*, 21 Mei 2015.
- “More migrants saved at sea by Acehnese fishermen”, *The Jakarta Post*, 21 Mei 2015.
- “Jokowi Meminta Dunia Turun Tangan”, *Kompas*, 25 Mei 2015.
- “Manusia Perahu Rohingya Tantangan bagi ASEAN”, *Kompas*, 24 Mei 2015.
- “ASEAN Didesak Selesaikan Krisis Rohingya”, *Okezone.com*, 26 Mei 2015, <http://news.okezone.com/read/2015/05/26/18/1155593/asean-didesak-selesaikan-krisis-rohingya> - diakses tanggal 27 Mei 2015.
- “Quiet seas point to ebb of migrant crisis in Asia”, *International New York Times*, 27 Mei 2015.
- Arif Havas Oegroseno, “Penanganan Komprehensif Rohingya”, *Kompas*, 27 Mei 2015.
- Al Khanif, “Rohingya: The Problem of minority groups”, *The Jakarta Post*, 27 Mei 2015.